

DITARGETKAN SELURUH KALURAHAN

Pemasangan Wifi Dukung Pembelajaran Daring

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul sudah memasang sebanyak 810 titik wifi gratis di seluruh instansi dan lokasi wisata termasuk untuk mendukung belajar jarak jauh. Sampai dengan tahun ini ditargetkan sebanyak 1.000 titik diharapkan sudah selesai dipasang. Pemasangan wifi tersebut juga diharapkan menjadi solusi danantisipasi di kawasan *blank spot* (sinyal kosong). "Kawasan sekolah termasuk memperoleh layanan wifi gratis dari pemerintah," kata Wakil Bupati Gunungkidul Dr Immawan Wahyudi MH Kamis (13/6). Pemerintah kabupaten ini mulai membangun layanan koneksi internet ke masyarakat dan selama ini sudah mencapai 810 titik internet dipasang, mulai dari sekolah, kantor kalurahan, kantor pelayanan publik, hingga lokasi wisata. Pemasangan jaringan internet ini sangat membantu mengurangi *blank spot* sehingga memudahkan siswa yang akan

belajar daring. Saat ini mereka bisa datang ke lokasi yang sudah ada wifinya, Pembangunan jaringan internet ini sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan Informasi dan Komunikasi dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Master Plan Smart City Kabupaten Gunungkidul. Secara terpisah Kabid Layanan Informatika Diskominfo Gunungkidul Setiyo Hartanto menjelaskan akhir tahun ini ada 1.000 titik yang terpasang jaringan internet. Saat ini 55 desa sedang dilakukan proses lelang, 210 sekolah tingkat SD dan SMP proses penyusunan skema dan kebijakan agar sesegera mungkin dapat dieksekusi di anggaran perubahan. "Akhir tahun sudah selesai 1.000 titik," terangnya. **(Bmp)-f**

KLASTER SRIKAYANGAN

Gugus Tugas Diminta Segera Bergerak Cepat

PENGASIH (KR) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten diminta DPRD Kulonprogo segera merapatkan barisan dan memperkuat komunikasi lintas pemangku kepentingan untuk mencegah penyebaran Covid-19, khususnya Klaster Srikayangan yang menyebabkan adanya 8 pasien yang positif.

Koordinasi harus diintensifkan dengan satuan tugas Covid-19 tingkat desa/kalurahan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker. "Klaster Srikayangan bila berada di satu wilayah, segera dilakukan isolasi wilayah lokal atau lockdown lokal, seperti kasus penyebaran Klaster Pedagang Ikan di Pasar Mendit dan Pasir Kadilangu," tegas Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati SE, Kamis (13/8). Diungkapkan Akhid, berdasarkan pengalamannya terjun dalam percepatan penanganan Covid-19 Klaster Pedagang Ikan, dilakukan isolasi

lokal, sehingga sampai saat ini, Klaster Pedagang Ikan hanya menyebabkan tiga pasien, dan tidak ada penyebaran ke luar. "Saya berharap, kasus Klaster Srikayangan juga dilokalisir, sehingga tidak menyebabkan pasien baru," ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kulonprogo Lajiyu Yok Mulyono mengaku kaget dengan munculnya Klaster Srikayangan yang menyebabkan 8 orang, dan 2 orang meninggal dunia. Penambahan kasus sangat signifikan ini telah memecahkan rekor sepanjang penambahan kasus Covid. "Petugas kesehatan diminta mel-



Akhid Nuryati SE

KR-Widiastuti

kukan penelusuran masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien positif. Gugus tugas diminta harus bergerak cepat agar Klaster Srikayangan tidak menyebar, bila diperlukan segera dilakukan lockdown lokal," tutur Yok Mulyono. **(Wid)-f**

RAPI Sosialisasi Daring Melalui HT

WONOSARI (KR) - Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) DIY menggelar sosialisasi pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (*daring*) dengan *handytalky* (HT) di MIN 8 Gunungkidul. Bahkan menjadi lembaga pendidikan pertama di DIY yang dijadikan percontohan oleh RAPI. "Penggunaan HT untuk pembelajaran *daring* akan diujicobakan di MIN 8 Gunungkidul," kata Ketua RAPI DIY, H Sulaiman Suseno MM. Kegiatan dihadiri Ketua RAPI Gunungkidul Sudiyono dan Kepala MIN 8 Gunungkidul Laily Fauziah. Diungkapkan, *daring* dengan HT sangat memungkinkan, bahkan lebih ekonomis. Satu buah HT seharga sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Ketika dipergunakan untuk *daring* tidak membutuhkan pulsa. Hanya cu-



H Sulaiman Suseno memberikan sambutan.

KR-Dedy EW

kup sumber listrik dan bisa menggunakan baterai. Untuk *daring* menggunakan frekuensi dari RAPI DIY. "Nantinya akan didampingi pengurus RAPI ketika *daring* melalui HT. Harapannya ini menjadi percontohan yang dapat dikembangkan di madrasah maupun sekolah lain," ucapnya. Dalam sosialisasi juga dilaksanakan simulasi untuk penggunaan HT *daring*. Kepala MIN 8 Gunungkidul Laily Fauziah menambahkan, saat ini

memang dilakukan sosialisasi dan simulasi. Tentu saja hasilnya akan dikomunikasikan dengan wali murid. Karena memang penggunaan HT ini akan lebih hemat dan mampu berkomunikasi langsung tanpa terkendala kuota. "Saat ini guru diberikan sosialisasi penggunaan HT untuk *daring*, nantinya akan dikomunikasikan dengan orang tua siswa, agar pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan lebih maksimal," ucapnya. **(Ded)-f**

TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Ditunda, Pembangunan TPAS Seluas 5 Hektare

WONOSARI (KR) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul saat ini tengah mengajukan anggaran Rp 10 miliar untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari. Saat ini pembebasan lahan seluas 5 hektare serta kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga sudah selesai dan rencana pembangunan TPAS tersebut diperkirakan mundur hingga tahun 2022.

"Pengolahan sampah ini nantinya menggunakan dua teknologi yang menjadi fasilitas unggulan TPAS Banjarejo, yakni autoclave dan hidrodrive," kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Aris Suryanto, Kamis (13/8). Kegunaan kedua alat tersebut untuk Autoclave berfungsi sebagai alat untuk menyeterilkan peralatan sedangkan hidrodrive untuk menghancurkan sampah yang akan diolah. Awalnya pihaknya merencanakan akan mulai pembangunan TPAS pada awal 2021. Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 rencana pembangunan tersebut mundur dari jadwal semula. Menurut dengan penambahan dua teknologi tersebut diharapkan lebih membuat efisien dalam pengolahan sampah. Sehingga dengan lahan yang hanya lima hektare masalah sampah di Bumi Handayani khususnya di sisi selatan dekat pantai segera teratasi. "Kalau untuk pembebasan tanah sudah dilakukan dan tinggal me-

nunggu pelaksanaan pembangunannya." ujarnya. Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Agus Priyanto MSI penunjukan lokasi pembangunan di Padukuhan Wonosobo, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari merupakan hasil rekomendasi dari konsultan perencana. Sebelum penunjukan, ada tiga opsi untuk pembangunan TPAS. "Ketiga lokasi ini meliputi Desa Banjero, Tanjungsari; Desa Monggol, Saptosari dan Desa Tepus, Kecamatan Tepus. Dipilihnya Banjarejo karena berada di tengah-tengah selain itu juga untuk mengakomodir sampah-sampah dari kegiatan pariwisata yang berada di wilayah selatan Gunungkidul," terangnya. **(Bmp)-f**

BUMIKAN NILAI PENGAWASAN

Bawaslu Gelar Mural Pengawasan Pemilu

WATES (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo dalam menyambut HUT ke-2 menggelar lomba mural bertemakan pengawasan pemilu, Kamis (13/8), di Kantor Bawaslu setempat. Lomba yang diikuti 11 tim dari 14 yang mendaftar ini merupakan rangkaian kegiatan Gema Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kulonprogo sejak akhir Maret 2020. Ketua/Koordinator Divisi Pengawasan,

Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kulonprogo Ria Harlinawati SIP MA menjelaskan, kegiatan ini sudah melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo. Sehingga dilakukan dengan memperhatikan protokol Covid-19, di antaranya dengan membatasi peserta, menjaga jarak, dan ketentuan protokol kesehatan lainnya. **(Wid)-f**

Petani Tingkatkan Produktivitas Panenan

TEMON (KR) - Para petani Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon terus *ngulir budi* atau berusaha meningkatkan produktivitas panenan padi. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang dihasilkan pada musim taman (MT) kedua mencapai 8,2 ton per hektare (ha). Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo mengungkapkan produksi panen GKG di Kaligintung mampu melampaui panenan rata-rata di Kulonprogo 6,5 ton per ha. Petani diharapkan terus meningkatkan produktivitas pertanian meskipun surplus untuk mencukupi kebutuhan sendiri. "Petani harus *ngulir budi* pane-

nan padi terus meningkat. Sebagian panenan dapat dijual untuk mencukupi kebutuhan orang lain," ujar Sutedjo pada acara wiyatan dan panen raya padi MT kedua di Bulak Silayur, Kalurahan Kaligintung, Rabu (12/8). Menurut, keberhasilan anggota kelompok tani eSilayuri diharapkan memotivasi kelompok tani lain untuk selalu berusaha meningkatkan produktivitas padi. Dinas Pertanian dan Pangan (PP) Kulonprogo akan mengevaluasi produktivitas panenan untuk selalu ditingkatkan. Ketua Kelompok Tani Silayur, Supto menjelaskan produktivitas

panenan GKG di MT kedua mencapai 8,2 ton ada peningkatan dibandingkan MT kedua di 2019 baru mencapai sekitar 7,2 ton per ha. Selain penanaman menerapkan legawa jajar, katanya pengendalian organisme pengganggu tanaman menggunakan agen hayati. Pemupukan menggunakan pupuk mikro majemuk anorganik Forsil yang diproduksi oleh PT Mitra Kreasi-dharma. "Dengan penggunaan pupuk mikro majemuk anorganik mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas panenan. Tanaman lebih tahan terhadap serangan OPT," ujar Supto. **(Ras)-f**

FKUB - Bupati Bahas Izin Peribadatan

WATES (KR) - Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo memberi lampu hijau kepada pengelola Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wates Selatan terkait izin sementara kegiatan peribadatan. Pihak gereja diminta membuat surat permohonan rekomendasi ke Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kulonprogo dan Forum Komuni-

kasi Umat Beragama (FKUB). Selanjutnya membuat permohonan rekomendasi ke bupati. "Kemudian Pemkab bisa membuat surat izin sementara dan tentang perdatan. Pihak gereja diminta membuat surat permohonan rekomendasi ke Kepala Kankemenag Kulonprogo. Prinsipnya Pemkab siap membantu agar legalitas kegiatan tetap terpenuhi," kata Bupati Sutedjo, saat menerima audiensi perwakilan majelis GKJ Wates Selatan di ruang bupati setempat, Selasa (11/8) lalu. Pertemuan itu membahas mengenai legalitas atau izin sementara GKJ Wates Selatan. Sedangkan Kepala Kankemenag Kulonprogo, Ahmad Fauzi mengimbau pihak GKJ Wates Selatan menjaga ketenteraman dan ketertiban. "Tentang perizinan sementara terkait pemanfaatan rumah atau gedung, diperlukan izin tertulis dari pemilik bangunan, rekomendasi dari lurah setempat. Seba-

gai tempat peribadatan memang tetap harus menjaga ketenteraman dan ketertiban," tuturnya. Perwakilan majelis GKJ Wates Selatan, Sutomo menyampaikan pengajuan perpanjangan izin di masa pandemi ini, karena adanya protokol kesehatan untuk melakukan pembatasan sosial. "Kami mendapatkan izin perdua tahun sekali dan untuk tahun ini berakhir 28 Agustus 2020. Mohon petunjuk Pak Bupati Sutedjo, langkah kami harus bagaimana," ujar Sutomo selaku pendeta GKJ Wates Selatan saat audiensi. **(Rul)-f**

PEMKAB KULONPROGO 'SAMPLE' OBJEK PEMERIKSAAN Auditor BPK Periksa Penerapan SPBE Berintegritas



Bupati Sutedjo dan Kepala Perwakilan BPK DIY VM Ambar Wahyuni (kanan depan) di ruang rapat staf ahli bupati.

WATES (KR) - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan DIY melakukan pemeriksaan pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo, Jumat (14/8). Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan DIY Kholid Muslim menegaskan, pemeriksaan pendahuluan SPBE tahun anggaran 2019-2020 semester I pada Pemkab Kulonprogo dan instansi terkait lainnya untuk menentukan lingkup pemeriksaan atas isu potensi terutama yang berhubungan dengan tata kelola SPBE berbasis administrasi pemerintahan. "Dipilihnya Pemkab Kulonprogo sebagai *sample* pemeriksaan pendahuluan SPBE, karena kabupaten ini memperoleh predikat penilaian baik oleh Kementerian PAN dan RB.

Domain tata kelola maupun layanan SPBE yang melebihi target Kementerian PAN dan RB," katanya, Kamis (13/8). Inspektur Daerah (Irda) Kulonprogo Drs Riyadi Sunarto mengatakan, Pemkab dan masyarakat Kulonprogo merasa bangga lantaran kabupaten ini jadi *sample* objek pemeriksaan SPBE. Pemeriksaan berlangsung 3 - 17 Agustus 2020 di ruang rapat staf ahli bupati tersebut untuk mengetahui regulasi, tata kelola, manajemen, audit dan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kulonprogo," ucapnya. Transformasi penyelenggaraan pemerintahan bukan pilihan, tapi keniscayaan. Terlebih pandemi Covid-19 memaksa pemerintah mengubah layanan publik dari manual ke digital. Audit kinerja SPBE jadi kebutuhan untuk mengetahui kondisi penerapan,

permasalahan dan kendala yang dihadapi guna mewujudkan pemerintahan digital. Dalam pemeriksaan pendahuluan penerapan layanan administrasi pemerintahan kepada perangkat daerah terkait sesuai jadwal. Pemeriksaan berjalan dengan berintegritas, Pemkab hanya menyediakan ruang rapat. "Bahkan mereka tidak mau disugahi makanan dan minuman. Komitmen tim pemeriksa BPK dalam menjaga independensi dan integritas, patut diapresiasi," puji Didik. Seperti pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD), Kulonprogo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut 2013-2019. Didik menceritakan saat pertama kali, dalam pemeriksaan pendahuluan LKPD 2016, dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPK dan Auditor mengenakan kain tersebut. Tapi yang terjadi Tim Pemeriksa BPK tidak berkenan dan meminta alamat perajin batik untuk membeli langsung ke perajin," tuturnya. **(Rul)-f**

"MULIA"
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID-19
GRAND INNA MALIBORO HOTEL JL. MALIBORO 60 YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB

PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND
TELP : 4331272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB

JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 5015000
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

TANGGAL	13/Aug/20	
CURRENCIES	BELI	JUAL
USD	14.800	15.100
EURO	17.475	17.775
AUD	10.600	10.850
GBP	19.300	19.700
CHF	16.200	16.500
SGD	10.800	11.100
JPY	138,50	143,50
MYR	3.400	3.600
SAR	3.650	3.950
YUAN	2.050	2.175

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing



Bupati Drs Sutedjo (kiri) dan Ahmad Fauzi (kanan) saat menerima audiensi pengurus GKJ Wates Selatan.

KR-Asrul Sani